

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Budidaya Perikanan merupakan kegiatan pemeliharaan biota air di lingkungan yang terkontrol. Kegiatan budidaya perikanan mencakup kegiatan budidaya air tawar, air laut dan air payau (Sukadi 2002). Pesisir Selatan memiliki sumber daya alam dan potensi yang baik untuk kegiatan perikanan. Panjang Pantai Kabupaten Pesisir Selatan adalah 218. Jumlah sungai besar adalah 22 buah dengan panjang sungai 663,42 km. Area lahan basah (wetland) seluas 5.749,89 km². Curah Hujan di Kabupaten Pesisir Selatan 2.197 mm³ dengan jumlah rata-rata sebanyak 134 hari (BPS Kab. Pesisir Selatan 2018)

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi ketersediaan air yang tinggi. Pengembangan budidaya perikanan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat. Salah satu kegiatan pengembangan budidaya perikanan adalah kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan.

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan SDM pembudidaya ikan yang sesuai dengan standar cara budidaya yang baik dan benar (CBIB). Peningkatan produksi melalui pembinaan juga dilakukan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat pembudidaya dalam pentingnya badan hukum usaha.

1.2. Tujuan

1. Membina Kelompok untuk meningkatkan SDM pembudidaya Ikan
2. Meningkatkan kesejahteraan melalui pembinaan peningkatan produksi
3. Pengembangan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan
4. Meningkatkan Ekonomi dalam usaha budidaya Ikan.

1.3. Sasaran

Pembinaan untuk peningkatan produksi perikanan budidaya perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Pokdakan Sungai Tigo
2. Pokdakan Palak kapeh
3. Pokdakan Lambau Jaya
4. Pokdakan Karang Sapau

5. Pokdakan Maju Bersama
6. Pokdakan Berjuang Bersama
7. Pokdakan Karang Indah
8. Pokdakan Harapan Baru
9. Pokdakan Riak Pantai
10. Pokdakan Airland Sepakat
11. Pokdakan Buah Tarasah
12. Pokdakan Sari Sarumpun
13. Pokdakan Aie Bariak
14. Pokdakan Sumua Gadang
15. Pokdakan Minang Aquari
16. Pokdakan Tani Timbulun
17. Pokdakan Joran Saiyo
18. Pokdakan Lubuak Sariak Saiyo
19. Pokdakan Tabek Berkah
20. Pokdakan Lele Berkah
21. Pokdakan Tarok Indah
22. Pokdakan Bukit Punai Sepakat
23. Pokdakan Pila Jaya
24. Pokdakan Kato Saiyo
25. Pokdakan Tunas Mandiri
26. Pokdakan lainnya.

1.4. Output

Terlaksananya tertib administrasi Kegiatan Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan

1.5. Outcome

Meningkatnya SDM dan produksi pembudidaya ikan..

BAB. II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pembinaan kelompok pembudidaya ikan dilakukan pada kelompok yang aktif dan memiliki badan hukum.

2.2. Realisasi Keuangan dan Fisik

Realisasi keuangan dari kegiatan Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan dianalisis menggunakan pengukuran evaluasi kinerja atas aspek implementasi (Permen Keuangan No. 214/PMK.02/2017). Aspek Implementasi yang diukur adalah penyerapan anggaran. Anggaran yang terserap pada Kegiatan Pendampingan Pusat dan Provinsi adalah % (tabel 1).

Tabel 1 Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran			Serapan anggaran
Jumlah	Realisasi	Sisa Pagu	
Rp 48.075.000	Rp. 40.250.970,-	Rp. 7.824.030,-	83,72%

Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Dinas Perikanan Tahun 2019

Menurut Permen PMK No. 214/PMK.02/2017, Penyerapan merupakan salah satu bentuk unsur akuntabilitas keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan dikerjakan dengan pengelolaan yang baik. Penyerapan anggaran dipengaruhi oleh perencanaan, pelaksanaan anggaran, komitmen pengelolaan yang baik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

3.1. PERMASALAHAN

Kegiatan Pendampingan Pusat Provinsi tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak terjadi masalah.

3.2. PEMECAHAN MASALAH

Pemecahan masalah tidak dilakukan karena tidak ada permasalahan yang dialami.

BAB. IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pembinaan Kelompok budidaya ikan dilakukan kepada Pokdakan yang aktif dan berbadan hukum. Kegiatan ini mendorong produksi dan peningkatan sumberdaya manusia yang dapat bersaing.

4.2 Saran

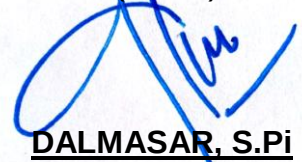
Melalui pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya diharapkan SDM dan produksi dapat selalu meningkat. Pokdakan yang belum memiliki badan hukum diharapkan dapat berbadan hukum dan tumbuhnya kelompok berbadan hukum.

Demikianlah Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya. Atas Perhatiannya diucapkan terima terima kasih.

KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
(KPA)



Painan, 30 Desember 2019
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan
(PPTK)



DALMASAR, S.Pi

NIP. 19661212 200701 1 008

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan. 2018. Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka Pesisir Selatan Regency in Figures 2018. Badan Pusat Statistik Pesisir Selatan

Sukadi, FM. 2002. Peningkatan Teknologi Budidaya Perikanan. Jurnal Iktiologi Indonesia Vol.2, No. 2, 2002: 61-66 ISSN 1693 - 0339